

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN

ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Anisa Nur Fina Ardiani

NIM : 31402000188

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

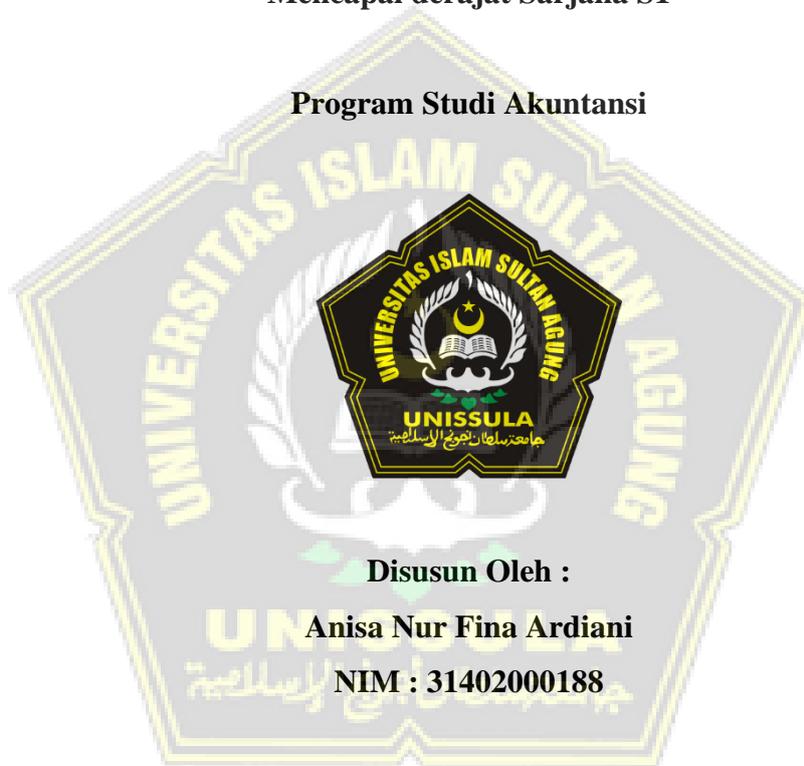
**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Anisa Nur Fina Ardiani

NIM : 31402000188

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH**

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)

Disusun Oleh :

Anisa Nur Fina Ardiani

NIM : 31402000188

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 5 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.

NIDN. 0628106301

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)**

**Disusun Oleh :
Anisa Nur Fina Ardiani
NIM : 31402000188**

Telah dipetahankan di depan penguji
Pada tanggal 28 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,



Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA,
NIDN.0628106301

Penguji,



Dr. M. Jafar Shodiq, S.E., SSI, M.Si
NIDN.0612026802



Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si
NIDN.0628106702

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 28 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA
NIDN.0613086204

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Nur Fina Ardiani

NIM : 31402000188

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : SI Akuntansi

Judul Skripsi : PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2020)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti plagiat, manipulasi dan/ atau pemalsuan data maupun bentuk kecurangan lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 5 Juli 2022



Anisa Nur Fina Ardiani

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Nur Fina Ardiani
NIM : 31402000188
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH”

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Juli 2022

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
90AJX891131310

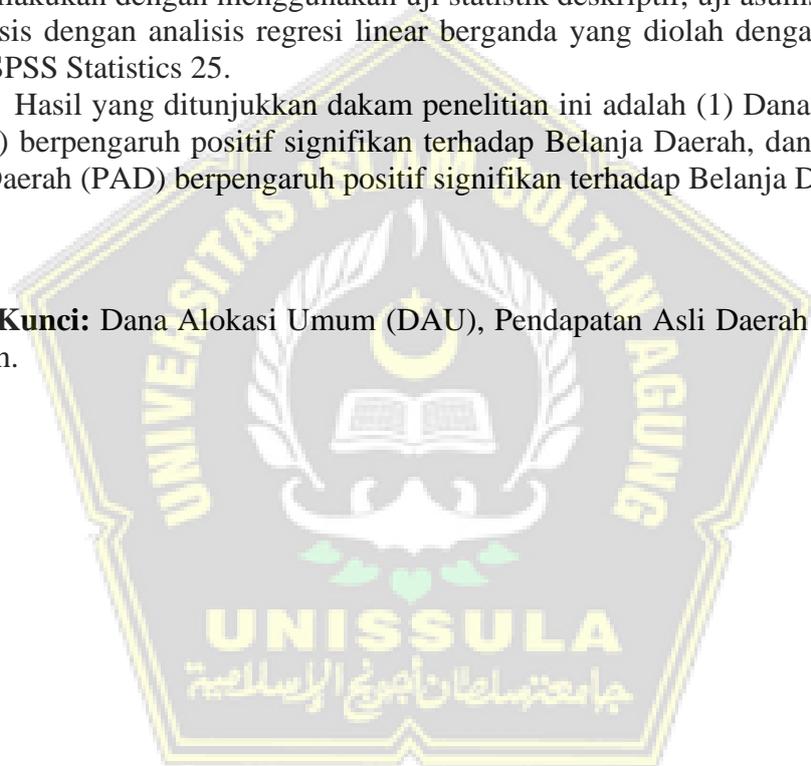
(Anisa Nur Fina Ardiani)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020 yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampel jenuh yaitu dengan seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tahun 2018-2020. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 25.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah (1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, dan (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah.

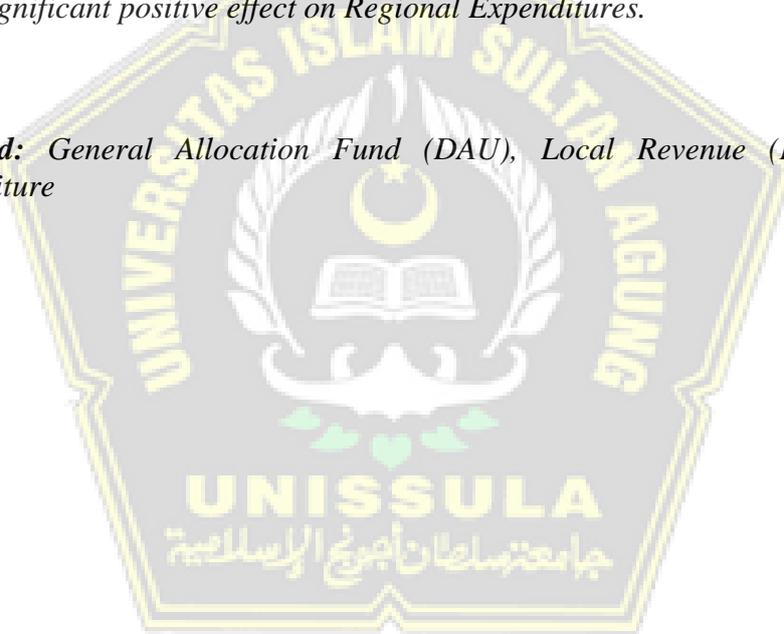


ABSTRACT

The aimed of this research is to examine the effect of the General Allocation Fund (DAU) and Local Revenue (PAD) on General Expenditure at Regency/City in the Province of Central Java in the period 2018-2020 which consist 35 Regencies/Cities. The sample used in this research is using a saturated sample technique, with all members of the population used as samples. The data collection method uses secondary data, by using the Financial Statistics Report of Recency/City Governments in Central Java for 2018-2020. Data testing was performed using descriptive statistical test, classical assumption tests, and hypothesis testing with multiple linear regression analysis processed using IBM SPSS Statistics 25.

The result of this research show that (1) General Allocation Fund (DAU) has a significant positive effect on Regional Expenditures, and (2) Local Revenue (PAD) has a significant positive effect on Regional Expenditures.

Keyword: *General Allocation Fund (DAU), Local Revenue (PAD), Regional Expenditure*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan anugerah, taufik, hidayah, serta rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian skripsi ini dengan judul **“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)”**.

Tujuan dari usulan laporan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan sumbangan kepada siapapun yang membaca karya tulis ini dalam mendalami masalah akuntansi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan usulan penelitian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtua, Kakak, serta keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa kepada penulis.
2. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Kepala Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Wali penulis.
5. Bapak Dr. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan selama pembuatan Pra-Skripsi, Skripsi, dan Artikel Ilmiah ini.
6. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan informasi kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat semasa sekolah hingga kuliah yang tetap bersama saya serta memberi yang selalu memberikan doa dan dukungan dan semangat, serta selalu ada untuk saya saat suka maupun duka sehingga dapat penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung atau tidak langsung yang telah memberikan bantuan sehingga usulan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata semoga usulan penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terlebih untuk mahasiswa program studi akuntansi .

Semarang, 5 Juli 2022

Penulis



Anisa Nur Fina Ardiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Teori Agensi	11
2.2 Variabel Penelitian	13
2.2.1 Dana Alokasi Umum.....	13
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah	15
2.2.3 Belanja Daerah	18
2.2.4 Lokasi.....	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	21
2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis	26
2.4.1 Pengembangan Hipotesis	26
2.4.1.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah.....	26
2.4.1.2 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah	27

2.4.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel.....	29
3.2.1 Populasi.....	29
3.2.2 Sampel.....	30
3.3 Sumber dan Jenis Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.5.1 Dana Alokasi Umum (X_1).....	31
3.5.2 Pendapatan Asli Daerah (X_2)	32
3.5.3 Belanja Daerah (Y)	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	34
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.6.3 Uji Hipotesis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.2 Hasil Pengujian Penelitian.....	42
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif	42
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	44
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas.....	45
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas	45
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	45
4.2.3 Model Regresi Linear Berganda	46
4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R_2).....	47
4.2.5 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	47
4.2.6 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	48

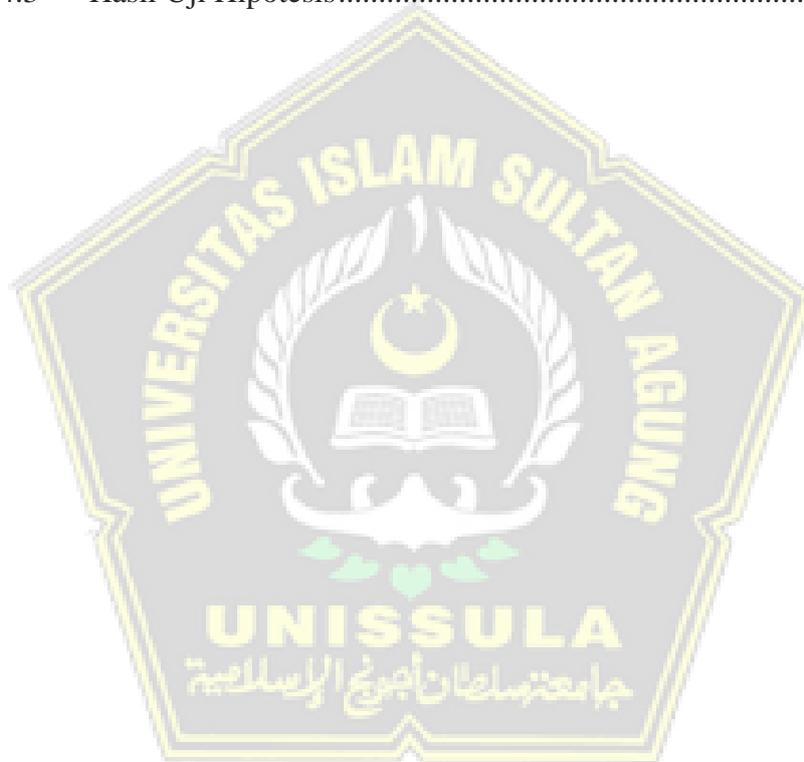
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Keterbatasan Penelitian	53
5.3 Saran & Implikasi.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Research Gap</i> terhadap Belanja Daerah	8
Tabel 2.1	Rincian Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1	<i>Definisi Operasional Variabel</i>	33
Tabel 3.2	<i>Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi</i>	37
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	44
Tabel 4.3	Hasil Uji Hipotesis.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1998 sampai saat ini, Negara Republik Indonesia diberlakukan sistem reformasi. Era reformasi ditandai dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang merujuk pada diberlakukannya desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Secara resmi desentralisasi fiskal di Indonesia mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah dan Desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri diatur dalam (UU No 23 Tahun 2004, 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan (UU No 33 Tahun 2004, 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah merupakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri termasuk penyusunan peraturan pemerintah daerah, memilih pemimpin di daerah tersebut, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, serta cara yang digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang tentunya semua itu masih berkiblat pada peraturan pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan daerah. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemandirian daerah tersebut untuk membiayai kepentingan daerah tersebut. Selain itu tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah juga dapat meningkatkan

pelayanan umum kepada masyarakat serta terbentuknya daya saing daerah tersebut dengan menonjolkan potensi daerah otonom tersebut.

Setiap awal periode tahun anggaran Pemerintah Daerah telah menyusun anggaran untuk melaksanakan kegiatan rumah tangganya selama satu tahun kedepan yang dapat disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun dan disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD bersifat terbuka bagi masyarakat umum sehingga dapat dijadikan sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya mengenai dana yang dimiliki oleh daerah dan bagaimana cara daerah mengelola dana tersebut. Dalam APBD terdapat tiga komponen penting sebagai inti dari APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah.

Seiring dengan berkembangnya jaman, diikuti pula oleh pembangunan - pembangunan yang dimaksudkan untuk menopang kehidupan bermasyarakat serta sosial-ekonomi. Maka dari itu Pemerintah Daerah dituntut dapat memiliki alokasi dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin dan harian yang dapat disebut dengan Belanja Daerah. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah dapat diukur dari pengalokasian Belanja Daerah, sehingga Belanja Daerah harus digunakan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah dengan efektif dan efisien.

Dengan semakin bertambahnya pengeluaran (belanja), Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam menjalankan keberlangsungan kegiatan pemerintahan dan melakukan pelayanan kepada

masyarakat, serta meningkatkan fasilitas dan pembangunan daerah sudah semestinya belanja daerah seimbang dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Bila belanja yang dibutuhkan oleh daerah semakin meningkat, maka daerah memerlukan dana lebih untuk pengeluaran belanja tersebut agar kebutuhan daerah terpenuhi (Rusmita, 2016). Melalui belanja daerah, diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam (UU No 33 Tahun 2004, 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (13) merupakan semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas/kekayaan bersih daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu periode tahun anggaran.

Pendapatan daerah sendiri terbentuk dari beberapa sumber-sumber yaitu: Bagian pertama, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum sendiri seperti namanya diberikan secara umum kepada daerah otonom di Indonesia, dan merupakan sumber dana utama dari Dana Perimbangan yang dialokasikan untuk digunakan sebagai belanja daerah otonom oleh Pemerintah Pusat kepada seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia sebagai wujud dari dilaksanakannya desentralisasi. Dana Alokasi Umum dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dilihat dari potensi penerimaan daerah dan kebutuhan fiskal daerah sehingga dapat mengetahui besaran anggaran dana guna menutup *fiscal gap* daerah. Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah sendiri menerima Dana Alokasi Umum dengan jumlah total 33,49T pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 35,06T pada tahun 2019 dan Kembali meningkat pada angka 35,16T pada tahun 2020. Jumlah ini merupakan yang paling banyak jika dibandingkan dengan pendapatan dari jenis Dana Perimbangan yang lain.

Bagian kedua, Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen utama dalam Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dan dipungut dari menggali potensi daerah dan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada tahun 2018 total Pendapatan Asli Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mencapai 13T. Meningkat pada tahun berikutnya tahun 2019 yaitu sebesar 14,23T. Kemudian meningkat kembali pada tahun berikutnya pada tahun 2020 yaitu sebesar 14,40T. Kemudian bagian ketiga dari Pendapatan Daerah yaitu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah selain dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Daerah. Namun fenomena yang terjadi pada aspek keuangan Pemerintah Daerah saat ini yaitu PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dalam APBD nilainya relatif kecil. Sehingga daerah memerlukan dana transfer salah satunya berupa DAU dari Pemerintah Pusat untuk menopang peranan pendapatan daerah dalam struktur APBD.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bantuan pendanaan dengan mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU diberikan sebagai konsekuensi akibat diberlakukannya desentralisasi yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan fiskal antardaerah. Maka dari itu kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah akan diiringi dengan pelimpahan sumber-sumber pendanaan yaitu berupa aspek perpajakan dan bantuan pendanaan dengan mekanisme transfer dana kepada daerah. Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat turut mempengaruhi besarnya jumlah Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan

bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi (Prakosa, 2004).

Selain dari Dana Alokasi Umum (DAU), setiap daerah memiliki potensi dan komoditas asli yang perlu digali guna meningkatkan pendapatan daerah tersebut agar tidak selalu bergantung pada dana yang di berikan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk kedalam salah satu komponen penting dalam APBD. Selain itu PAD juga merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam kemandirian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. PAD merupakan penambah nilai kekayaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Objek pendapatan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah harus jelas dasar hukumnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. PAD menunjukkan nilai pendapatan yang benar-benar diterima dan diakui oleh daerah yang selanjutnya akan digunakan sebagai pendanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi di seluruh dunia yang juga menyerang negara Indonesia dengan mewabahnya (COVID-19) menyebabkan terganggunya beberapa aspek kehidupan yaitu diantaranya kesehatan, perekonomian, sosial, dan juga politik. Pandemi virus covid-19 ini menyebabkan melemahnya perekonomian dan perdagangan di Indonesia akibat dari diterapkannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga menyebabkan seluruh kegiatan pada sektor esensial dan kritikal termasuk UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) terpaksa tutup. Padahal UMKM merupakan salah satu pendorong meningkatnya PAD pada

suatu daerah. Selain UMKM, pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan komponen dari PAD. Karena melemahnya perekonomian rakyat dan daerah, banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga pendapatan pajak daerah tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan menyebabkan menurunnya PAD. Demi menanggulangi masalah tersebut Pemerintah Daerah harus memutar otak agar daerah tetap dapat memungut pajak untuk meningkatkan PAD. Seperti Pemerintah Kota Semarang misalnya, dengan memberikan diskon kepada wajib pajak agar tetap membayar pajaknya sehingga daerah tetap mendapatkan pungutan pajak daerah tersebut dan pendapatan daerah dari sektor PAD tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam kaitannya DAU dengan Belanja Daerah terdapat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah, diantaranya oleh (Devita et al., 2014); (Gani & Kristanto, 2013); (Prakosa, 2004); (Amalia, 2015); (Pratama, 2021) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Semakin tingginya nilai DAU sejalan dengan meningkatnya nilai belanja daerah. Sedangkan dalam penelitian (Rahmawati & Suryono, 2015) mendapatkan hasil bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah. Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rusmita, 2016); (Ferdiansyah et al., 2018) menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian terdahulu untuk mengetahui hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah pernah diteliti oleh (Ferdiansyah et al., 2018); (Devita et al., 2014); (Prakosa, 2004); (Amalia, 2015); (Rahmawati & Suryono, 2015); (Melda & Syofyan, 2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap

belanja daerah. Sedangkan dalam penelitian (Pratama, 2021) PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah. Lain dengan penelitian (Rusmita, 2016) yang memberikan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh antara DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah yang pernah diteliti oleh (Gani & Kristanto, 2013). Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel, populasi, dan data tahun penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan variabel DAU dan DAK sebagai variabel independen dan belanja daerah sebagai variabel dependen dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera tahun 2007-2010 sebagai populasi, sedangkan dalam penelitian terbaru ini yang menjadi variabel independen adalah DAU dan PAD kemudian yang menjadi variabel dependen adalah belanja daerah. Selanjutnya populasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2020.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena gap diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, kemudian dapat dibuat rumusan masalah yang dirangkum dengan bentuk tabel berdasarkan kumpulan *research gap* sebagai berikut:

Tabel 1.1
Research Gap terhadap Belanja Daerah

Variabel	Berpengaruh Positif Signifikan	Berpengaruh Negatif Signifikan	Tidak Berpengaruh
Dana Alokasi Umum (DAU)	(Devita et al., 2014); (Gani & Kristanto, 2013); (Prakosa, 2004); (Amalia, 2015); (Pratama, 2021)	(Rahmawati & Suryono, 2015);	(Rusmita, 2016); (Ferdiansyah et al., 2018)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(Ferdiansyah et al., 2018); (Devita et al., 2014); (Prakosa, 2004); (Amalia, 2015); (Rahmawati & Suryono, 2015); (Melda & Syofyan, 2020)	(Pratama, 2021)	(Rusmita, 2016);

Sumber : Berbagai sumber yang dirangkum

Berdasarkan *gap* penelitian pada tabel diatas terlihat adanya perbedaan pada beberapa hasil penelitian yang cukup variatif. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ingin melihat hubungan dan pengaruh antar variabel yaitu “Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan mengangkat mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. Dari rumusan masalah diatas sehingga dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020?
- 2) Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.
- 2) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk dengan maksud penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- 1) Manfaat Teoritis
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.
 - Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, bahan bacaan, serta bahan kajian dalam mengembangkan ilmu ekonomi khususnya bidang Akuntansi Keuangan Publik.
- 2) Manfaat Praktis
 - Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan guna pembuatan keputusan atau kebijakan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik .
 - Bagi Universitas, sebagai bahan bacaan serta referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang serupa dengan penelitian ini yang mengarah pada Akuntansi Sektor Publik.

- Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu akuntansi sektor publik serta sarana untuk mengembangkan diri dalam penyusunan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Pada penelitian ini menggunakan teori agensi atau teori keagenan sebagai landasan teori. (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan teori agensi sebagai hubungan kerja antara dua pihak yang merupakan pihak prinsipal sebagai pemberi wewenang dan pihak agen sebagai penerima wewenang. Hubungan kerja keagenan ini dikatakan sebagai kontrak antara prinsipal yang menugaskan agen untuk melakukan beberapa jasa/layanan atas nama prinsipal yang mendelegasikan wewenang untuk selanjutnya agen yang akan membuat keputusan.

Teori agensi merupakan cabang dari *game theory* dimana di dalamnya mempelajari mengenai kerangka/skema kontrak antara prinsipal dan agen sebagai motivasi untuk agen agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinginkan principal (Scott, 2015). Teori agensi dijelaskan dengan suatu hubungan yang menggambarkan susunan dasar keagenan antara prinsipal dan agen yang terlibat dalam perilaku kooperatif, namun memiliki perbedaan tujuan dan perbedaan sikap terhadap resiko. Teori agensi dibuat untuk memecahkan permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989).

Dari definisi mengenai teori agensi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori agensi merupakan hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Dan dalam hubungan keagenan tersebut terdapat kontrak kerja dimana prinsipal sebagai pemberi wewenang kepada agen dan agen akan melaksanakan pengelolaan usaha serta membuat keputusan terbaik yang sesuai dengan prinsipal.

Dalam teori agensi disebutkan bahwa dilakukan pemisahan kepentingan terhadap dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Urusan keduanya dipisahkan dan tidak bercampur. Karena pemisahan kepentingan ini dalam hubungan keduanya dapat terjadi sebuah konflik. Konflik tersebut disebut sebagai konflik keagenan.

Teori keagenan mengimplikasikan saat pengungkapan informasi antara prinsipal dan agen biasanya terjadi konflik kepentingan atau yang biasa disebut asimetri informasi dimana informasi yang di dapat oleh prinsipal berbeda dengan agen. Asimetri informasi ini muncul apabila agen lebih mengetahui informasi keadaan di lapangan.

Teori agensi membagi rata serta menyelaraskan hak masing-masing pihak agen maupun prinsipal beserta kewajiban serta kepentingan dua pihak tersebut. Inti dari teori agensi yaitu untuk menyatukan/menggabungkan kepentingan antara dua pihak yaitu pihak prinsipal dan pihak agen agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Terkait dengan penelitian ini, yang disebut sebagai prinsipal yaitu masyarakat dalam hal ini di wakikan oleh wakil daerah (DPRD), sedangkan Pemerintah Daerah sebagai agen. Masyarakat yang diwakikan oleh DPRD sebagai prinsipal akan melimpahkan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (agen) untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Teori ini menunjukkan adanya konflik antara agen dan prinsipal. Hal ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal, yang mampu mengakibatkan timbulnya perilaku oportunistik agen yang dapat merugikan prinsipal. Dengan digunakan teori agensi diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara masyarakat (DPRD) dan pemerintah daerah dapat

diantisipasi agar tidak terjadi dengan dilakukannya pelaporan yang jelas, melakukan audit, dan keterbukaan (transparansi) mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum atau yang biasa disebut DAU merupakan pengalokasian dana oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah sejak 2001. (UU No 25 Tahun 1999, 1999) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan (UU No 33 Tahun 2004, 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia termasuk mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum.

DAU merupakan golongan Dana Perimbangan. DAU terdapat pada komponen pendapatan pada APBD yang bersumber pada APBN pada komponen belanja. DAU merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dana pembangunan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi.

Dalam (UU No 33 Tahun 2004, 2004), DAU dapat dihitung dengan perhitungan celah fiskal yang ditambah dengan alokasi dasar. Alokasi dasar merupakan Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan. Sedangkan celah fiskal merupakan Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal Daerah (KpF). KbF sendiri dapat dihitung dengan Total Belanja Daerah (TBD) x ((% Jumlah Penduduk) + (% Luas Wilayah) + (% Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) + (% Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)) + (% Pendapatan

Domestik Regional Bruto). Selanjutnya KpF dihitung dengan cara $(\% \text{ Pendapatan Asli Daerah}) + (\% \text{ Dana Bagi Hasil})$.

Dalam (UU No 33 Tahun 2004, 2004) disebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan seurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

DAU bersifat *block grant* artinya dana tersebut dialokasikan kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah masing-masing daerah yang dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan dari disalurkannya Dana Alokasi Umum yaitu agar kemampuan keuangan antar-daerah menjadi rata yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah dengan diterapkannya formula yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah. DAU pada daerah ditentukan melalui perhitungan besarnya celah fiskal (*fiscal gap*) pada daerah tersebut, celah fiskal tersebut merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dalam (UU No 33 Tahun 2004, 2004) kembali ditegaskan tentang formula celah fiskal serta penambahan variabel DAU. Alokasi DAU untuk daerah yang potensi fiskalnya tinggi namun kebutuhan fiskalnya rendah maka akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Namun sebaliknya bagi daerah yang memiliki potensi fiskal yang rendah namun kebutuhan fiskal tinggi maka akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif besar. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengalokasian DAU digunakan sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk kedalam Pendapatan Daerah. PAD merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah dari hasil pemungutan yang telah diatur berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dasar hukum pemungutan PAD diatur dalam:

- (UU No. 34 Tahun 2000, 2000) tentang perubahan atas (UU No. 18 Tahun 1997, 1997) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (PP No. 65 Tahun 2001, 2001) tentang Pajak Daerah; dan
- (PP No. 66 Tahun 2001, 2001) tentang Retribusi Daerah.

Tujuan dari PAD yaitu sebagai bentuk penyerahan wewenang kepada daerah serta memberikan keleluasaan untuk daerah dapat menggali kekayaan daerah untuk mendanai daerah dalam rangka otonomi daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

Adapun sumber pendapatan asli daerah dijabarkan lebih lanjut seperti dibawah ini :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah atau yang biasa disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sebagaimana yang diatur pada undang-undang. Daerah tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemungutan ini namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan mementingkan kesejahteraan masyarakat. Dalam (UU No. 28 Tahun 2009, 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran dan Rumah Makan;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Retribusi Daerah

Dalam (UU No. 28 Tahun 2009, 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah terdiri atas tiga kelompok retribusi, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ialah pungutan atas jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan serta kebermanfaatan untuk umum serta dapat dinikmati bagi orang pribadi maupun badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang diterima oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan jasa yang disediakan oleh pemerinrah daerah atas dasar prinsip komersial.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan yang oleh pribadi atau badan untuk kepada pemerintah daerah atas jasa atau pelayanan yang dimaksudkan sebagai

pengaturan serta pengawasan atas kegiatan yang meliputi pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah guna menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat umum.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penata usahaannya.

Jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN;
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan jenis pendapatan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk kedalam pajak daerah, retribusi daerah, ataupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah yaitu meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga deposito;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Komisi sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah;
- f. Potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda BPHTB;
- j. Pendapatan denda retribusi;

- k. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. Pendapatan dari pengembalian;
- m. Fasilitas sosial dan Fasilitas umum;
- n. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- o. Pendapatan dari angsuran /cicilan penjualan dan Hasil pengelolaan dana bergulir.

2.2.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No 33 Tahun 2004, 2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 Tahun 2005, 2005) tentang Pengelolaan Keuangan.

Sesuai dengan (Permendagri No 13 Tahun 2006, 2006) lalu diubah menjadi (Permendagri No 59 Tahun 2007, 2007) yang kemudian diubah kembali dengan (Permendagri No 21 Tahun 2011, 2011), belanja daerah dibagi ke dalam 2 kategori yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah anggaran belanja yang dibuat untuk secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal.

Sedangkan belanja tidak langsung yaitu anggaran belanja yang dibuat yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Belanja tidak langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;

- d. Hibah;
- e. Bantuan sosial;
- f. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
- g. Belanja tak terduga.

Sementara menurut (Permendagri No 64 Tahun 2013, 2013), belanja daerah dikelompokkan seperti berikut:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga;
- d. Belanja transfer.

Dalam belanja operasi terdiri dari:

- 1. Belanja pegawai;
- 2. Belanja barang;
- 3. Bunga;
- 4. Subsidi;
- 5. Hibah;
- 6. Bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari:

- 1. Belanja aset tetap;
- 2. Belanja aset lainnya.

Klasifikasi belanja daerah merujuk pada (Permendagri No 13 Tahun 2006, 2006) lalu disempurnakan dengan (Permendagri No 59 Tahun 2007, 2007) dan kembali disempurnakan dengan (Permendagri No 21 Tahun 2011, 2011). Lalu pada tahun 2013 kembali disahkan (Permendagri No 64 Tahun 2013, 2013) mengenai akuntansi berbasis akrual.

Pada (Permendagri No 13 Tahun 2006, 2006) belanja dikelompokkan berdasarkan penggunaannya lebih pada penganggaran, sedangkan (Permendagri No

64 Tahun 2013, 2013) pengelompokan belanja lebih kepada pelaporan. Keduanya sejalan, namun pada saat pelaporan harus ada proses konversi kelompok belanja.

Penyusunan belanja daerah diutamakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar terlaksana secara efektif untuk melaksanakan kewajiban daerah sebagai tanggung jawabnya.

2.2.4 Lokasi

Dalam penelitian dilakukan pada lokasi di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus kepada data dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah saja sehingga dapat mencerminkan data secara umum di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 35 Kabupaten/Kota yang masuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah. Daftar kabupaten dan kota di Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Banjarnegara
2. Kabupaten Banyumas
3. Kabupaten Batang
4. Kabupaten Blora
5. Kabupaten Boyolali
6. Kabupaten Brebes
7. Kabupaten Cilacap
8. Kabupaten Demak
9. Kabupaten Grobogan
10. Kabupaten Jepara
11. Kabupaten Karanganyar
12. Kabupaten Kebumen
13. Kabupaten Kendal
14. Kabupaten Klaten
15. Kabupaten Kudus
16. Kabupaten Magelang
17. Kabupaten Pati
18. Kabupaten Pekalongan

19. Kabupaten Pemalang
20. Kabupaten Purbalingga
21. Kabupaten Purworejo
22. Kabupaten Rembang
23. Kabupaten Semarang
24. Kabupaten Sragen
25. Kabupaten Sukoharjo
26. Kabupaten Tegal
27. Kabupaten Temanggung
28. Kabupaten Wonogiri
29. Kabupaten Wonosobo
30. Kota Magelang
31. Kota Pekalongan
32. Kota Salatiga
33. Kota Semarang
34. Kota Surakarta
35. Kota Tegal

Dilihat dari cukup banyaknya kabupaten/kota di Jawa Tengah, pastinya setiap daerah memiliki keadaan atau kondisi daerah yang berbeda-beda dan beragam. Dari sana lah kita bisa mendapatkan hasil yang general atau berlaku secara umum mengenai hasil penelitian ini di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan diteliti kurang lebih 3 kabupaten/kota yaitu Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Pekalongan.

Provinsi Jawa Tengah juga banyak memiliki prestasi diantaranya yaitu : meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award yang diberikan kepada provinsi yang efisien dalam penggunaan anggaran neagra pada tahun 2019 , menjadi provinsi ter-inovatif se-Indonesia dalam Innovative Government Award (2020) dan lain sebagainya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berhubungan dan sesuai dengan tema penelitian ini yang telah dihimpun dari berbagai sumber:

Tabel 2.1
Rincian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel dan Sampel	Hasil Penelitian
1	(Gani William, Kristanto Septian Bayu, 2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.	Variabel independen : DAU, DAK Variabel dependen : Belanja Daerah Sampel : 55 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2007-2010.	1.DAU berpengaruh terhadap besarnya Belanja Daerah 2.DAK berpengaruh terhadap besarnya Belanja Daerah.
2	(Melda Helmi, Syofyan Efrizal, 2020). <i>Analisis Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.	Variabel independen : DAU, DAK, DBH, PAD Variabel dependen : Belanja Daerah Sampel : 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2018.	1.DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 2.DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah 3.Terjadi <i>flypaper effect</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3	(Prakosa Kesit Bambang, 2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah.	Variabel independen : DAU, PAD Variabel dependen : Prediksi Belanja Daerah Sampel : 40 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY.	1.DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (dengan atau tanpa lag) 2.Ketika tidak menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih kuat 3.Ketika menggunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD 4.Terjadi <i>flypaper effect</i> dalam respon Pemda

			terhadap DAU dan PAD.
4	(Delis Arman, Devita Andri, Junaidi, 2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.	Variabel independen : PAD, DAU, Jumlah Penduduk Variabel dependen : Belanja Daerah Sampel : 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.	1.PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 2.Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan negative terhadap Belanja Langsung.
5	(Ferdiansyah Irfan, et al, 2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.	Variabel independen : PAD, DAU, DAK, DP Variabel dependen : Belanja Daerah Sampel : 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2016.	1.PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah 2.DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. 3.DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah 4.Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
6	(Amalia, 2015) Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.	Variabel independen : PAD, DAU Variabel dependen: Belanja Daerah Sampel : 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2013.	1.Secara simultan, PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah 2.DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. 3.Koefisien regresi variabel PAD lebih besar dibandingkan dengan DAU, menunjukkan tidak terjadi <i>flypaper effect</i> .

7	(Rusmita Sari, 2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.	Variabel independen : DAU, PAD Variabel dependen : Belanja Daerah Sampel : 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2014	1.DAU dan PAD secara individu tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
8	(Rahmawati & Suryono, 2015) Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.	Variabel independen : DAU, PAD Variabel dependen : Belanja Daerah Sampel : Kabupaten/Kota di Jawa Timur (khususnya: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, Surabaya) tahun 2009-2013.	1.DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Daerah 2.PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 3.Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi flypaper effect selama tahun 2009-2013 pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur (khususnya: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, Surabaya) karena tidak sesuai dengan kriteria terjadinya flypaper effect.
9	(Pratama, 2021) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2018	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Variabel dependen : Belanja Daerah Sampel : Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2018.	1.Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah 2.PAD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah 3.DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.
10	(Ikhsan Harahap dkk, 2019).	Variabel independen : DAU, PAD	1.DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

	Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening.	Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi Variabel mediasi : Belanja Daerah Sampel : 20 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2018.	2.PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3.DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah 4.PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah 5.Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 6.DAU dan PAD berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 7.DAU dan PAD berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variable intervening, dan Belanja Daerah mampu memediasi antara variabel independen dan dependen.
--	---	--	---

Sumber: Berbagai sumber yang dirangkum

2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis merupakan jawaban awal dan belum final yang kebenarannya masih harus diteliti dan diuji, atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diambil dari tinjauan pustaka (Martono, 2010). Jawaban yang belum final atau dugaan sementara yang tertuang dalam hipotesis merupakan jawaban atas hubungan antara dua atau lebih variabel yang ada dalam suatu penelitian.

2.4.1 Pengembangan Hipotesis

2.4.1.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi umum adalah dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang ditujukan sebagai dana pembangunan bagi daerah agar tercipta keseimbangan kemampuan keuangan antardaerah. DAU dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan memperhitungkan celah fiskal (*fiscal gap*) daerah masing-masing, yang artinya pemerintah pusat mempertimbangkan mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Cara tersebut akan lebih tepat untuk mencapai tujuan dari pengalokasian DAU yaitu untuk pemerataan keuangan antardaerah. Kaitannya dengan teori keagenan, dalam hal ini DAU terdapat hubungan kontraktual yang dapat dilihat dengan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai agen dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat sebagai prinsipal dengan alokasi belanja daerah yang didasarkan oleh DAU, agar daerah tersebut memiliki kesetaraan dalam hal keuangan fiskal dengan daerah lain.

DAU termasuk kedalam sub pendapatan pada APBD, sedangkan belanja daerah masuk kedalam sub belanja. (Aziz et al., 2000) dan (Doi, 1998) dalam (Prakosa, 2004) Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan. Kaitannya dengan dana perimbangan dalam hal ini yaitu dana alokasi umum, terdapat keterkaitan erat antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah (Holtz-Eakin et al., 1994). (Legrenzi & Milas, 2001) melakukan studi di Italia dan mendapatkan bukti empiris yang menyebutkan bahwa dalam jangka panjang dana transfer memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik ditegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek

disesuaikan dengan jumlah dana transfer yang diterima, sehingga mungkin adanya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prakosa, 2004) dan (Amalia, 2015) mendapatkan hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₁: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2.4.1.2 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

PAD merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah dalam rangka perwujudan desentralisasi. PAD dipungut sebagai wujud pajak untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu mendanai pembangunan daerah, membangun fasilitas umum, serta menyejahterakan masyarakat daerah. Dalam hal ini hubungan keagenan pada PAD dapat dilihat dengan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai agen dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat yaitu sebagai prinsipal dengan meningkatkan alokasi belanja daerah yang salah satunya diperoleh dari pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

PAD menjadi salah satu sumber pembelanjaan daerah. Dengan meningkatnya jumlah PAD maka pemerintah daerah akan memiliki dana lebih untuk membiayai kebutuhan daerah, serta kemandirian daerah juga akan meningkat, selanjutnya pemerintah daerah akan dapat lebih menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah

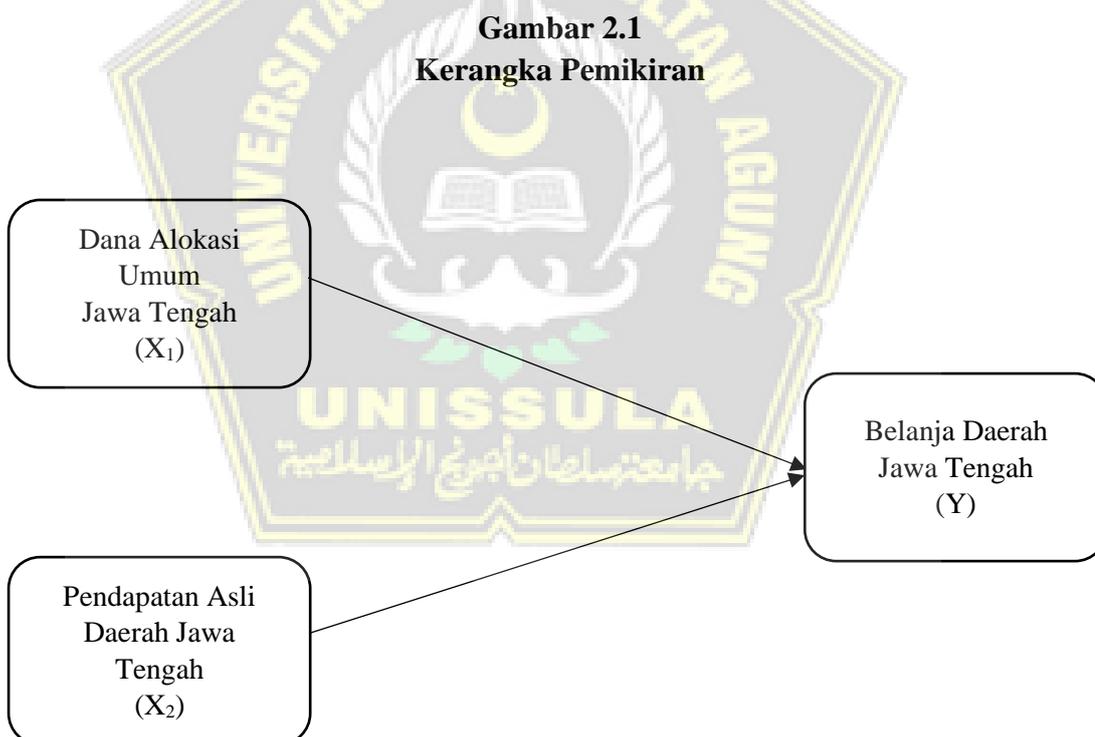
yang akhirnya juga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pula (Tambunan, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh (Devita et al., 2014) dan (Ferdiansyah et al., 2018) mendapatkan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₂: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2.4.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka gambaran hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dibuat kerangka pemikiran seperti gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan uraian kerangka penelitian diatas, maka penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2004) pendekatan kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan sebagai penelitian pada populasi/sampel tertentu. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel dilaksanakan secara random, pengambilan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut (Margono, 2004), populasi yaitu keseluruhan data dari objek penelitian yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu sesuai dengan yang peneliti tentukan sebagai sumber data yang dimiliki. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Peneliti mengambil populasi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah karena Kabupaten/Kota di Jawa Tengah banyak memiliki prestasi di tingkat nasional terutama dalam bidang perekonomian. Selain itu Pemprov Jawa Tengah tahun 2019 mendapatkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award (merdeka.com). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020.

3.2.2 Sampel

Sampel menurut (Arikunto, 2006) merupakan sebagian atau menjadi wakil dari suatu populasi yang akan diteliti. Apabila penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi yang ada maka penelitian tersebut dikatakan penelitian sampel. Terdapat beberapa teknik dalam menentukan sampel dalam penelitian. Menurut (Margono, 2004) teknik pengambilan sampel adalah suatu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.

Pada penelitian ini, teknik yang dilakukan dalam menentukan sampel dengan memakai teknik sampling jenuh. (Sugiono, 2017) teknik sampling jenuh merupakan teknik pemilihan sampel dengan menjadikan seluruh populasi digunakan menjadi sampel penelitian. Istilah lain dari sampel jenuh yaitu sensus.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah diolah oleh peneliti yang yang didapatkan dari sumber lain. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber lain dengan cara tidak langsung. Data sekunder dapat berupa diagram, grafik, atau tabel yang diambil dari sumber buku, jurnal, situs web, atau dokumen pemerintah. Dalam penelitian ini data diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dibuat dan dilengkapi dengan menggunakan data sekunder, data sekunder tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan hasil audit yang diakses melalui laman resmi Badan Pusat Statistik Jawa

Tengah. Kemudian dilakukan rekapitulasi dari data-data tersebut lalu diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasional menurut (Sutama, 2016) merupakan pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis.

3.5.1 Dana Alokasi Umum (X_1)

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel independent pertama (X_1) adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen atau yang dapat disebut dengan variabel bebas merupakan variabel yang dapat digantikan dengan variabel lainnya.

Menurut (UU No 33 Tahun 2004, 2004), Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, dana alokasi umum bersifat umum digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar-daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah serta untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan (UU No 33 Tahun 2004, 2004) proporsi DAU untuk daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkanimbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan:

Alokasi Dasar = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal Daerah (KpF)

KbF = Total Belanja Daerah (TBD) x ((% Jumlah Penduduk) + (% Luas Wilayah) + (% Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) + (% Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)) + (% Pendapatan Domestik Regional Bruto)

KpF = (% Pendapatan Asli Daerah) + (% Dana Bagi Hasil)

3.5.2 Pendapatan Asli Daerah (X₂)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian ini berperan sebagai variabel independent kedua (X₂). Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen atau yang biasa disebut variabel bebas merupakan variabel yang dapat digantikan oleh variabel lainnya.

Pendapatan Asli Daerah yang ditulis dalam (UU No 33 Tahun 2004, 2004), adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dimiliki daerah tersebut, PAD diterima daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan PAD berdasarkan (UU No 33 Tahun 2004, 2004) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$PAD = PD + RD + HPKD + LPS$$

Keterangan:

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPS = Lain-lain PAD yang Sah

3.5.3 Belanja Daerah (Y)

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel dependen (Y) yaitu Belanja Daerah. Variabel dependen atau yang biasa disebut variabel terikat merupakan variabel yang tidak dapat digantikan. Variabel terikat timbul karena pengaruh atau akibat langsung dari variabel independen. Variabel dependen menjadi fokus dari suatu penelitian.

Belanja Daerah menurut (PP Nomor 12 Tahun 2019, 2019), merupakan semua kewajiban pembiayaan oleh daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah yang berupa Perhitungan Belanja Daerah sesuai dengan (PP Nomor 12 Tahun 2019, 2019) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$BD = BO + BM + BTD + BT$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

BO = Belanja Operasi

BM = Belanja Modal

BTD = Belanja Tak Terduga

BT = Belanja Transfer

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Operasional	Indikator	Skala
1	Dana Alokasi Umum (DAU) (X ₁)	Dana yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah yang memiliki tujuan pemerataan kemampuan keuangan dan untuk mendanai	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar	Rasio

		kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No 33 Tahun 2004, 2004)		
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2)	Pendapatan yang diterima oleh daerah dari hasil pungutan atas sumber daya dan potensi daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU No 33 Tahun 2004, 2004).	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah	Rasio
3	Belanja Daerah (Y)	Belanja Daerah merupakan semua kewajiban yang harus Pemerintah Daerah bayarkan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau ekuitas dalam satu periode anggaran yang tersebut. (PP Nomor 12 Tahun 2019, 2019).	Belanja Daerah = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tak Terduga + Belanja Transfer	Rasio

Sumber: Berbagai sumber yang dirangkum.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif yaitu gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), varian, maksimum, minimum, *sum*, *average*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif diperlukan dalam penelitian digunakan untuk memudahkan dalam memahami informasi inti mengenai kumpulan data yang tersaji.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda terhadap hipotesis yang terdapat dalam penelitian, serta merupakan

persyaratan statistik yang perlu dipenuhi oleh sebuah analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut (Ghozali, 2016) dilakukan untuk menilai apakah antara variabel dependen dan variabel independen atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak normal pada suatu model regresi. Jika hasil penelitian menemukan bahwa salah satu variabel terdistribusi dengan tidak normal, maka hasil pengujian statistik akan mengalami penurunan.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kormogorov Smirnov*. Jika hasil pada *One Sample Kormogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5% maka dikatakan data terdistribusi dengan normal. Namun apabila hasil nilai signifikansi menunjukkan angka dibawah 0,05 atau 5% maka data terdistribusi dengan tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas menurut (Ghozali, 2016) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik, seharusnya tidak memiliki hubungan korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi antar variabel independen maka variabel-variabel tersebut tidak *orthogonal*. *Variable orthogonal* yaitu variabel independen yang nilai korelasinya dengan variabel independen lain nilainya sama dengan nol. Bila hal ini terjadi maka peneliti akan kesulitan untuk membedakan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan *tolerance value* (nilai toleransi) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data dari variabel independen yang dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas yaitu yang nilainya memenuhi syarat nilai toleransi nya lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu yang homokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. Beberapa cara untuk melakukan uji heterokedastisitas diantaranya yaitu: uji grafik plot, uji *park*, uji *glejser*, uji *white*. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik plot antara prediksi nilai variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Jika dalam pengujian ini hasil menunjukkan tidak ada pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji terhadap suatu model regresi linear apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terdapat korelasi, maka dikatakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2011).

Dalam penelitian untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson* (DW test). Pengujian dilakukan dengan melakukan regresi terlebih dahulu lalu kemudian menghitung nilai DW-nya. Dengan jumlah sampel

tertentu dan variabel tertentu akan diperoleh nilai kritis batas bawah (d_l) dan batas atas (d_u) dalam tabel daftar distribusi DW dengan berbagai nilai α .

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: (Ghozali, 2011)

Selain dengan menggunakan alat uji *Durbin-Watson*, terdapat alat pengujian lain untuk uji autokorelasi yaitu dengan menggunakan alat uji *Runs Test* yang akan digunakan dalam penelitian ini. *Runs Test* merupakan salah satu bagian dari statistik non-parametrik, untuk menguji apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Jika antar residual memiliki korelasi yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Pada dasarnya *Runs Test* merupakan suatu metode untuk melihat apakah suatu data diambil secara acak atau tidak.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji *runs test* untuk menentukan ada atau tidaknya gejala autokorelasi yaitu:

1. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi;
2. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi.

3.6.3 Uji Hipotesis

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linear. Model regresi linear yang digunakan yaitu model regresi linear berganda. Selain analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis secara parsial (uji t), dan uji hipotesis secara simultan (uji F).

1. Model Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda merupakan metode analisis regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan variabel independen (X_1) dan (X_2) terhadap variabel dependen (Y). Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{PAD} + \text{Error}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen atau belanja daerah

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi atau *slope*

DAU = Variabel independen pertama (1)

PAD = Variabel independen kedua (2)

ε = Error term atau Residual

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang ada dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Dalam uji F prosedur dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_i = 0$, jika seperti ini maka hasil penelitian berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_i \neq 0$, jika seperti ini maka hasil penelitian berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Menentukan Tingkat Signifikansi F

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam Uji t pada penelitian ini yaitu sebesar $\alpha = 1\%$, 5% , 10% . Derajat bebas (df) dalam distribusi t ada dua, yaitu:

a. Df numerator = $df_n = df_1 = k - 1$

b. Df denominator = $dfd = df = n - k$

Keterangan :

Df = degree of freedom atau derajat kebebasan

n = jumlah sampel

k = banyaknya koefisien regresi + konstanta

3. Menentukan regresi + konstanta

Jika nilai F lebih besar dari pada 4, maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan begitu dapat dikatakan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang menyatakan bahwa variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

4. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan dengan langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_i = 0$. Artinya tidak terdapat pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_i \neq 0$. Artinya terdapat pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam Uji t pada penelitian ini yaitu sebesar $\alpha = 1\%, 5\%, 10\%$. Derajat bebas (df) dalam distribusi t ada dua, yaitu:

a. Df numerator = $df_n = df_1 = k - 1$

b. Df denominator = $df_d = df = n - k$

Keterangan :

Df = degree of freedom atau derajat kebebasan

n = jumlah sampel

k = banyaknya koefisien regresi

3. Menentukan kriteria keputusan

Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 : diterima dan H_a : ditolak.

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 : ditolak dan H_a : diterima.

Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan berupa laporan hasil audit statistik keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang dapat diakses melalui laman resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik sampling jenuh atau seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Sehingga didapatkan sampel data dalam penelitian ini yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota x 3 tahun = 105 sampel.

4.2 Hasil Pengujian Penelitian

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Dalam analisis statistik deskriptif akan didapatkan hasil mengenai gambaran umum mengenai suatu data yang meliputi nilai minimum, maximum, rata-rata (mean), median, dan standar deviasi dari dua variabel independen dalam penelitian yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah. Kemudian dilakukanlah pengujian statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 25 dan di dapatkan lah hasil yang disajikan dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
(dlm milyar rupiah)

	Min.	Max.	Mean	Median	Std. Deviation
Dana Alokasi Umum	440	1.461	988	985	252,70
Pendapatan Asli Daerah	179	2.517	396	338	318,99
Belanja Daerah	883	5.256	2.286	2.247	742,16
N = 105					

Sumber: Data diolah oleh peneliti melalui spss25 tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan deskripsi setiap variabel penelitian ini sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimum sebesar 440M dengan nilai maximum sebesar 1.461M. Sedangkan nilai mean atau rata-ratanya sebesar 988M lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 253M. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data untuk variabel Dana Alokasi Umum baik dan tidak terlalu bervariasi. Selanjutnya nilai mean lebih tinggi daripada median sebesar 985M, artinya bahwa rata-rata data Dana Alokasi Umum dalam sampel tinggi.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 179M dengan nilai maximum sebesar 2.517M. Sedangkan nilai mean atau rata-ratanya sebesar 396M lebih besar daripada nilai standar deviasinya sebesar 319M. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data untuk variabel Pendapatan Asli Daerah baik dan tidak terlalu bervariasi. Selanjutnya nilai mean lebih besar daripada nilai median sebesar 338M, artinya bahwa rata-rata data Pendapatan Asli Daerah dalam sampel tinggi.

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah mempunyai nilai miumum sebesar 883M dengan nilai maximum sebesar 5.256M. Sedangkan nilai mean atau rata-ratanya sebesar 2.286M lebih besar daripada nilai standar deviasinya sebesar 742M. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data untuk variabel Belanja Daerah baik dan tidak terlalu bervariasi. Selanjutnya nilai mean lebih besar daripada nilai median sebesar 2.247M, artinya bahwa rata-rata data Belanja Daerah dalam sampel tinggi.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Terdapat empat pengujian yang dilakukan dalam Uji Asumsi Klasik yaitu : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokoelasi. Berikut merupakan hasil yang didapat setelah melakukan ke-empat pengujian tersebut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Variabel	Hasil			Keterangan
		Asymp. Sig.	VIF	Tolerance	
Uji Normalitas		0,200			Terdistribusi Normal
Uji Multikolinearitas	Dana Alokasi Umum		1,152	0,868	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Pendapatan Asli Daerah		1,152	0,868	
Uji Heterokedastisitas	Dana Alokasi Umum	0,078			Tidak Terjadi Heterokedastisitas
	Pendapatan Asli Daerah	0,893			
Uji Autokorelasi		0,203			Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data diolah oleh peneliti melalui spss25 tahun 2022

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun variabel dependen yang terdapat dalam penelitian terdistribusi dengan normal pada suatu model regresi linear. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Melalui tabel 4.2 didapatkan hasil yang

menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan terdistribusi dengan normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance value* (nilai toleransi) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai VIF variabel DAU dan PAD adalah $1,152 < 10$ dan nilai *tolerance value* sebesar $0,868 > 0,10$. Maka dapat dinyatakan bahwa data independen dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terjadi perbedaan varian dari residual antar pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya. Uji heterokedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji glejser (*glejser test*). Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa nilai signifikansi variabel DAU sebesar $0,078 > 0,05$ dan nilai signifikansi pada variabel PAD sebesar $0,893 > 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada setiap periode (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t_1). Pengujian autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *runs test*. Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan hasil

signifikansi dalam *runs test* sebesar 0,203 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi atau tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.2.3 Model Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda merupakan metode analisis regresi yang digunakan untuk untuk menguji hipotesis mengenai hubungan variabel DAU dan PAD terhadap variabel Belanja Daerah. Berikut hasil uji hipotesis disajikan dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Beta Unstandardized	t hitung	Tingkat Signifikansi
Konstanta	-219,733	-4,409	0,000
Dana Alokasi Umum	2,101	40,083	0,000
Pendapatan Asli Daerah	1,085	26,133	0,000
Y = Belanja Daerah			
Adjusted R Square = 0,971 (97,1%)			
F = 1756,623 dan nilai signifikansinya 0,000			

Sumber: Data diolah oleh peneliti melalui spss25 tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \alpha + \beta_1 \text{ DAU} + \beta_2 \text{ PAD} + \text{Error}$$

$$\text{Belanja Daerah} = -219,733 + 2,101 \text{ DAU} + 1,085 \text{ PAD} + e$$

Dalam persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (α) sebesar -219,733 menunjukkan pengaruh dari variabel DAU dan PAD terhadap variabel Belanja Daerah. Jika variabel DAU dan PAD sama dengan nol, maka besarnya total Belanja Daerah akan konstan yaitu -219,733.

- b. Koefisien β_1 DAU sebesar 2,101 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah dimana setiap kali terjadi perubahan kenaikan satu satuan DAU maka nilai total Belanja Daerah akan meningkat sebesar 2,101 dengan asumsi bahwa nilai variabel PAD adalah konstan.
- c. Koefisien β_2 PAD sebesar 1,085 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah dimana setiap kali terjadi perubahan kenaikan satu satuan PAD maka nilai total Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1,085 dengan asumsi bahwa nilai variabel DAU adalah konstan.

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.3 diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,971 yang berarti variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,1% yang menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel Belanja Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah sendiri terbentuk dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Lain-Lain yang Sah turut menjadi pendukung besarnya variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai nilai yang tinggi untuk mempengaruhi variabel Belanja Daerah. Sedangkan nilai sisanya sebesar 2,9% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain diluar model penelitian untuk mempengaruhi Belanja Daerah.

4.2.5 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pegujian F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama dari variabel DAU dan PAD terhadap variabel Belanja Daerah. Dalam

tabel 4.3 diketahui nilai F sebesar 1.756,62 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel DAU dan PAD berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah.

4.2.6 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara individu pada variabel independen yaitu DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah. Hasil uji t pada tabel 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan nilai koefisien DAU sebesar 2,101, artinya bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan nilai t sebesar 40,083 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka H_0 : ditolak dan H_a : diterima. Artinya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah.
2. Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan nilai koefisien PAD sebesar 1,085, artinya bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan nilai t sebesar 26,133 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka H_0 : ditolak dan H_a : diterima. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan diatas, maka selanjutnya pembahasan hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan berbagai pengujian diatas didapatkan hasil bahwa Dana

Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, yang berarti bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Hasil ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif dimana nilai mean Dana Alokasi Umum sebesar 988M lebih besar daripada nilai mediannya sebesar 985M, artinya nilai Dana Alokasi Umum tinggi dibuktikan dengan nilai mean yang lebih besar dari nilai median. Serta nilai mean Dana Alokasi Umum lebih tinggi daripada nilai standar deviasinya sebesar 253M, artinya data sampel Dana Alokasi Umum hampir mendekati nilai mean dan dinilai kurang bervariasi. Selanjutnya nilai mean Belanja Daerah sebesar 2.286M lebih besar daripada nilai mediannya yaitu sebesar 2.247M, artinya bahwa nilai Belanja Daerah tinggi. Kemudian nilai mean pada Belanja Daerah lebih tinggi daripada nilai standar deviasinya sebesar 742M, artinya data sampel Belanja Daerah hampir mendekati nilai mean dan dinilai kurang bervariasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil statistik bahwa bila Dana Alokasi Umum tinggi maka Belanja Daerah juga akan tinggi. Nilai mean pada variabel Dana Alokasi Umum maupun variabel Belanja Daerah memiliki nilai yang berbeda sehingga nilai mean tetap mencerminkan nilai yang sebenarnya pada setiap variabel tersebut.

Hasil dari penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Prakosa, 2004) dan (Amalia, 2015) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian (Amalia, 2015) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum kepada Pemerintah Daerah yang bersifat umum dengan maksud untuk pemerataan keuangan antar daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum diberikan berdasarkan tingkat potensi fiskal masing-masing daerah. Berdasarkan pengertiannya

tujuan diberikannya Dana Alokasi Umum yaitu pada dasarnya digunakan sebagai “alat pancing” bagi suatu daerah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam hal ini berarti DAU sebagai dana transfer atau dana bantuan dari Pemerintah Pusat dibagikan merata kepada setiap daerah sesuai dengan kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan dan pengeluaran rutin daerahnya. Diharapkan dengan diberikannya DAU secara merata kepada Pemerintah Daerah terkait, setiap daerah dapat berkembang dan tidak terjadi ketimpangan fiskal. Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam hal kemandirian keuangan daerah masing-masing banyak yang masih mengandalkan DAU dalam mendanai kegiatan rutin daerahnya.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan berbagai pengujian diatas didapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, yang berarti bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Hasil ini dapat dilihat dari nilai mean Pendapatan Asli Daerah sebesar 396M yang lebih besar daripada nilai mediannya sebesar 338M, artinya nilai Pendapatan Asli Daerah tinggi dibuktikan dengan lebih besarnya nilai mean daripada nilai median. Serta nilai mean Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi daripada nilai standar deviasinya sebesar 319M, artinya data sampel Pendapatan Asli Daerah hampir mendekati nilai mean dan dinilai kurang bervariasi. Selanjutnya nilai mean Belanja Daerah sebesar 2.286M lebih besar daripada nilai mediannya yaitu sebesar 2.247M. artinya bahwa

nilai Belanja Daerah tinggi. Kemudian nilai mean pada Belanja Daerah lebih tinggi daripada nilai standar deviasinya sebesar 742M, artinya data sampel Belanja Daerah hampir mendekati nilai mean dan dinilai kurang bervariasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil statistik bahwa bila Pendapatan Asli Daerah tinggi maka akan diikuti dengan Belanja Daerah juga akan tinggi. Nilai mean pada variabel Pendapatan Asli Daerah maupun variabel Belanja Daerah merupakan nilai yang berbeda sehingga nilai mean tetap mencerminkan nilai yang sebenarnya pada setiap variabel tersebut.

Hasil dari penelitian ini sesuai serta mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Ferdiansyah et al., 2018) dan (Devita et al., 2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian (Melda & Syofyan, 2020) menyatakan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Daerah, karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi pengelolaan PAD oleh Pemerintah Daerah menjadikan masyarakat sadar akan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik serta meningkatkan fasilitas daerah.

Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi besarnya Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah utamanya dianggarkan untuk memenuhi kegiatan dan kebutuhan daerah serta meningkatkan mutu pelayanan daerah selain itu juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum daerah. Pendapatan Asli Daerah digunakan juga sebagai salah satu indikasi kemandirian suatu daerah. Tinggi rendahnya PAD juga menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Pusat dalam menganggarkan DAU kepada masing-masing daerah. Pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah umumnya memiliki PAD yang masih rendah pada beberapa kabupaten, namun PAD di beberapa kota seperti Kota Semarang yang menjadi Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020 dengan jumlah sebanyak 105 sampel, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga bila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Umum maka hal tersebut akan berpengaruh pada kenaikan Belanja Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Apabila terjadi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah maka hal tersebut juga akan mempengaruhi Belanja Daerah yang juga akan meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data tahun pada saat sebelum dan setelah terjadi pandemi COVID-19 yaitu tahun 2018 – 2019 saat sebelum terjadi pandemi dan tahun 2020 saat terjadi pandemi yang kemudian saat pengolahan data tidak ada pemisahan pada data – data tersebut yang terbagi pada perbedaan situasi dan kondisi pada tahun terkait.

5.3 Saran & Implikasi

Saran & implikasi yang dapat disampaikan penulis setelah melakukan proses penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memisahkan data sebelum pandemi dan sesudah pandemi saat melakukan penelitian yang terdapat perbedaan situasi dan kondisi pada tahun tertentu.
2. Bagi Pemerintah Daerah terkait sebaiknya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena dalam hal ini PAD merupakan faktor penting bagi suatu daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah serta digunakan pula untuk mendanai kegiatan daerah serta meningkatkan fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga tidak terlalu menggantungkan dan mengandalkan Pendapatan Daerah dari dana transfer dalam hal ini Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat saja.
3. Pemerintah Daerah dapat menggunakan cara membangun fasilitas wisata untuk umum dan menyejahterakan UMKM atau dengan sosialisasi pajak sehingga masyarakat patuh pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Pemerintah Pusat dapat membatasi aliran dana transfer berupa Dana Alokasi Umum sehingga Pemerintah Daerah dapat mencapai kemandirian keuangan daerah agar sesuai dengan asas desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2015). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 11(1), 1–25.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineka Cipta.
- Aziz, M. A., Habibullah, M. S., Azman-Saini, W. N. ., & Azali, M. (2000). *The casual relationship between tax revenues and governement spending in Malaysia*.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/2255/pdf>
- Doi, T. (1998). Is Japanese local finance really centralized? From viewpoint of the revenue-expenditure nexus. In *University of Tokyo*.
- Eisenhardt, M. K. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. *The Academy of Management Review*. 14(1), 57–74.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Gani, W., & Kristanto, S. B. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 115–122.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Holtz-Eakin, D., Rosen, H. S., & Tilly, S. (1994). Intertemporal Analysis of state in local governemnt spending: Theory and test. *Journal Of Urban Economics*, 35, 159–174.
- Ikhsan Harahap dkk, M. (2019). Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Interveinig. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 2.
- UU No 25 Tahun 1999, Pub. L. No. 25 tahun 1999 (1999).
- UU No. 34 Tahun 2000, Pub. L. No. 34 tahun 2000 (2000).

- UU No 33 Tahun 2004, Pub. L. No. 33 tahun 2004, Sekretaris Negara Republik Indonesia 1 (2004).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Legrenzi, G., & Milas, C. (2001). Non-linier and asymetrics adjustment in the local revenue – expenditure models: some evidence from the Italian municipalities. In *University of Milan*.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif. Analisa isi dan analisa data sekunder*. Raja Grafindo Persada.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252>
- UU No. 18 Tahun 1997, Pub. L. No. 18 Tahun 1997 (1997).
- PP No. 65 Tahun 2001, Pub. L. No. 65 tahun 2001 (2001).
- PP No. 66 tahun 2001, Pub. L. No. 66 tahun 2001 (2001).
- PP No. 58 tahun 2005, Pub. L. No. 58 tahun 2005 (2005).
- Permendagri No 13 Tahun 2006, Pub. L. No. 13 tahun 2006 (2006).
- Permendagri No 59 Tahun 2007, Pub. L. No. 59 tahun 2007 (2007).
- UU No. 28 tahun 2009, Pub. L. No. 28 tahun 2009 (2009).
- Permendagri No 21 Tahun 2011, Pub. L. No. 21 tahun 2011 (2011).
- Permendagri No 64 Tahun 2013, Pub. L. No. 64 tahun 2013 (2013).
- PP Nomor 12 Tahun 2019, Pub. L. No. 12 tahun 2019, Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia 184 (2019).
- Prakosa, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2), 101–118. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=23336
- Pratama, B. A. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 -2018. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 9(1), 41–48. <https://doi.org/10.51747/ecobuss.v9i1.643>
- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan

Pendapatan Asli. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 59–70.

- Rasyid, S. (2020). *Merdeka.com*. Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/jateng/raih-penghargaan-sakip-ini-5-prestasi-jawa-tengah-di-bawah-kepemimpinan-ganjar.html>
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory Sevent Edition*. Canada Cataloguing.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Sutama. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D*. Fairuz Media.
- Tambunan, T. T. H. (2006). *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- UU No 23 Tahun 2014, Pub. L. No. 23 tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2014).
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059>
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>

